



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Standar Pelayanan Publik

Balai Embrio Ternak

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya laporan pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2022 Dalam Rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Ternak Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui bersama, konsep partisipasi dalam penyelenggaraan negara lahir sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, setiap orang dihargai sebagai makhluk moral dan rasional yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Demokrasi dan partisipasi adalah ibarat dua sisi sekeping mata uang yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Demokrasi hanya dapat dibangun dengan partisipasi, di mana semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah mengamanatkan partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kebijakan. Secara khusus, terkait dengan Standar Pelayanan Publik , Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas menyebutkan bahwa penyelenggara publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik, sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan uji publik dalam bentuk Forum Konsultasi Publik terhadap Standar Pelayanan Publik yang disusun.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SKEMA	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
BAB II METODOLOGI	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP	3
A. Pra Pelaksanaan	3
B. Pelaksanaan	3
C. Pasca Pelaksanaan	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	5
A. Metode Pengumpulan data dan informasi	5
B. Metode Analisis	6
4. Susunan Acara FKP	6
BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi	8
BAB IV. PENUTUP	9
1. Kesimpulan	9
2. Saran	9
DAFTAR LAMPIRAN	10

DAFTAR SKEMA

Skema 1 Skema Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) BET Cipelang Th. 20225

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Acara Pertemuan Evaluasi Kegiatan dan Forum Komunikasi Publik Th. 20226

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Undangan Forum Konsultasi Publik.....	10
Lampiran 2 Berita Acara Forum Konsultasi Publik	12
Lampiran 3 Salinan Daftar Hadir.....	14
Lampiran 4 Notulensi Forum Konsultasi Publik	18
Lampiran 5 Dokumentasi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	24
Lampiran 6 Materi FKP.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) No 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, pasal 1 (1) menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis layanan. Serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah. Maka, untuk memberikan layanan publik yang semakin berkualitas Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang melibatkan masyarakat dalam menyusun Standar Pelayanan Publik. Dokumen ini berisikan 14 komponen yang terdiri dari 6 komponen Standar Pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan 8 komponen Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan di BET (*Manufacturing*). Standar Pelayanan yang disusun mengacu pada jenis layanan yang dilakukan di BET.

Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik, sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan uji publik dalam bentuk Forum Konsultasi Publik terhadap Standar Pelayanan Publik yang disusun.

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap penyelenggaraan pelayanan, forum konsultasi publik juga merupakan sarana untuk menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik ini adalah:

- Memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada antara lain, terkait penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh BET sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada BET atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah

- a. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan (BET) sehingga dapat meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik/pengguna layanan.
- b. Bagi BET Cipelang:
 - Mendapatkan masukan /saran dari masyarakat/publik berkaitan dengan Standar Pelayanan yang disusun untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaanya.
 - Sarana mengajak dan mendidik publik
 - Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang ditetapkan
- c. Bagi publik/pemangku kepentingan
 - Ruang partisipasi masyarakat
 - Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan
 - Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan
 - Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik adalah "Standar Pelayanan Publik" yang telah disusun oleh BET untuk dikaji bersama dengan peserta forum konsultasi publik, sehingga Standar Pelayanan Publik yang nantinya akan ditetapkan sudah diketahui oleh publik dan diharapkan dalam pelaksanaannya akan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II METODOLOGI

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik terhadap Standar Pelayanan Publik BET Cipelang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 27 Januari 2022 di Pajajaran Suite Hotel & Resort yang beralamat di Perumahan Bogor Nirwana Residence Jl. Bogor Inner Ringroad Lot XIX C-2 No 17, RT.01/RW.05, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat.

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan oleh BET Cipelang dan peserta yang hadir meliputi : akademisi/dosen, mahasiswa/pelajar, Dinas Provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, tokoh masyarakat, swasta, UPT Kementerian Pertanian dan UPT Daerah. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 62 orang (daftar hadir terlampir). Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara langsung (*offline*) dan online. Anggaran FKP bersumber pada anggaran APBN tahun 2022. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahunan dilakukan melalui mekanisme berikut; pra, saat, dan pasca pelaksanaan.

A. Pra Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

- 1) Adanya kondisi COVID-19 di Indonesia, rencana awal Forum Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan pada bulan November 2021, telah dilakukan revisi beberapa kali menyesuaikan kondisi dilapangan. Setelah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal, telah disepakati Forum tersebut dilaksanakan secara daring dan langsung melalui dialog interaktif dengan pemangku kepentingan.
- 2) Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik
- 3) Koordinasi dan konsultasi dengan Analis Kebijakan Muda KemenPANRB Deputi Bidang Pelayanan Publik dalam menyusun rancangan Standar Pelayanan Publik BET Cipelang Tahun 2022.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dijabarkan sebagai berikut :

- 1) FKP diselenggarakan pada 27 Januari 2022, diselenggarakan secara hybrid yaitu dengan cara diskusi secara langsung (*offline*) dan online melalui aplikasi *zoom meeting*.
- 2) Penyelenggaraan FKP mengundang kurang lebih 62 peserta terdiri dari perwakilan akademisi, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, tokoh masyarakat, UPT Kementerian Pertanian, UPT Daerah dan Mahasiswa/Pelajar.

- 3) Penyelenggaraan FKP diawali dengan pembukaan oleh Kepala Balai Embrio Ternak, drh. Oloan Parlindungan, MP. Selanjutnya penyampaian materi "Kebijakan Standar Pelayanan Publik" disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, Jeffry Erlan Muller
- 4) Penyampaian materi diskusi "Rancangan Standar Pelayanan Publik BET" disampaikan oleh Subkoordinator Informasi dan Penyebaran Informasi BET, Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si. sebagai moderator adalah Dr Jakaria Dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Sebanyak 9 Standar Pelayanan Publik disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain:
 - Standar Pelayanan Penjualan Embrio
 - Standar Pelayanan Penjualan Ternak Bibit
 - Standar Pelayanan Produksi Embrio dan Transfer Embrio
 - Standar Pelayanan Juri Kontes Ternak
 - Standar Pelayanan Jasa Narasumber/Instruktur
 - Standar Pelayanan Penelitian dan Pengembangan
 - Standar Pelayanan Magang/Bimtek
 - Standar Pelayanan Kunjungan Wisata Peternakan
 - Standar Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Publik
- 5) Penampungan masukan secara langsung melalui diskusi terbuka, serta dilakukan melalui WhatsApp Official dan email setelah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- 6) Penandatanganan Berita Acara FKP yang diwakili oleh pemangku kepentingan diantaranya, akademisi, mahasiswa/pelajar, peternak swasta, UPT pusat Kementerian, UPT daerah, tokoh masyarakat, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten.

C. Pasca Pelaksanaan

Pasca pelaksanaan kegiatan FKP adalah sebagai berikut:

- 1) Selama 7 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan FKP, BET memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan. Saran dan masukan disampaikan melalui WhatsApp Official BET 08111148878 dan email bet.cipelang@pertanian.go.id.
- 2) Tindak lanjut Berita Acara FKP disampaikan setelah 7 hari kerja, diumumkan dan dapat dipantau oleh pemangku kepentingan secara terbuka melalui website BET Cipelang.
- 3) Membuat Laporan kegiatan FKP



Skema 1 Skema Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) BET Cipelang Th. 2022

3. Metode Pelaksanaan FKP

A. Metode Pengumpulan data dan informasi

Sebagai bagian dalam persiapan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, pengumpulan data dan informasi merupakan hal yang harus dilakukan. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Forum Konsultasi Publik antara lain:

1) Daftar stake holder yang akan diundang

Forum Konsultasi Publik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan stakeholder terkait yang bertujuan untuk merumuskan bersama apa yang akan menjadi prioritas dan harapan publik. Hal ini menjadi dasar pentingnya dilakukan inventarisasi stakeholder agar pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan masukan.

2) Materi yang disampaikan

Materi yang akan disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik juga merupakan hal yang penting dan harus dipikirkan bersama. Materi ini penting untuk mengarahkan peserta agar dapat memberikan masukan yang sesuai dengan harapan BET dalam memberikan pelayanan.

3) Narasumber yang akan dilibatkan

Pemilihan narasumber sangat penting untuk diperhatikan mengingat dalam diskusi akan terjadi komunikasi 2 (dua) arah antara pemerintah dengan peserta, sehingga dengan pemilihan Narasumber yang tepat, akan sangat membantu dalam kelancaran proses diskusi.

4) Mekanismc diskusi dan penjaringan saran masukan

Metode diskusi yang tepat juga penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kegiatan. Forum Konsultasi Publik diselenggarakan dalam rangka menjaring

masukan peserta secara umum, bukan spesifik, sehingga pemilihan mekanisme diskusi akan membantu dalam pencapaian tujuan kegiatan.

- 5) Pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. Peserta juga diharapkan masih dapat memberikan masukan melalui sistem informasi atau website. Oleh karena itu, konsep penjaringan masukan pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilakukan melalui Whatsapp Official dan email BET Cipelang.

B. Metode Analisis

Setiap masukan yang disampaikan oleh peserta akan diverifikasi dan diolah terlebih dahulu oleh Subkoordinator Informasi dan Penyebaran Hasil dan Kepala BET untuk dijawab dan ditindaklanjuti.

4. Susunan Acara FKP

Kegiatan FKP Standar Pelayanan Publik BET diselenggarakan di Pajajaran Suite Hotel & Resort tanggal 27 Januari 2022 dengan susunan acara sebagai berikut :

Hari / Tanggal	Waktu	Buatan acara	Pembicara	Moderator	Keterangan
Kamis, 27 Januari 2022	11.00 - 12.30	Registrasi	Pemda		Adanai dengan makan siang
	13.30 - 14.00	Pembukaan	Pemda		Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Doa
	14.00 - 14.15	Bimbingan Kepala Bala	Kepala BET Cipelang		
	14.15 - 14.30	Arahan direktur	Direktur Peritelan & Produk Terak		
	14.30 - 16.00	Paparan standar BET Cipelang	Kepala Bala	Kakubbeg Tata Usaha	
	16.00 - 16.30	ISHQNA	Pemda		
	16.30 - 18.45	Penghargaan Standar Pelayanan Publik Bag. Badan Publik	Dewan Pelayanan Publik Kementerian PAN & RB	Dr. Jakarta	
	18.45 - 19.30	Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BET Cipelang	Sut Komunitas Informasi dan Penyebaran Hasil	Dr. Jakarta	
	19.30 - 19.30	ISHQNA	Pemda		

Tabel 1 Jadwal Acara Pertemuan Evaluasi Kegiatan dan Forum Komunikasi Publik Th. 2022

BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Saat diskusi berlangsung, terlihat bahwa peserta begitu antusias dalam mengikuti kegiatan, sehingga terjadi komunikasi 2 (dua) arah yang cukup baik. Dalam sesi diskusi, juga disampaikan pula bahwa masukan atau tanggapan yang tidak terakomodasi selama pelaksanaan FKP, dapat disampaikan melalui Whatsapp official dan email yang telah disediakan oleh Penanggung Jawab FKP.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik didapat pertanyaan dan masukan dari peserta yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perwakilan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi Mountong
Terkait pelayanan Transfer Embrio ke Daerah, Bagaimana pembagian kuota embrio yang didistribusikan oleh BET terutama untuk embrio hibah dari BET? Dan bagaimana justifikasi pelaksanaan TE kepada peternak?
- b. Bapak Lukman dari BPPIBTSP Bunikasih Kabupaten Cianjur Jawa Barat:
Terhadap persyaratan pelayanan Transfer Embrio, Peternak yang direkomendasikan oleh Dinas atau peternak yang minta rekomendasi?
- c. Bapak Efdal Kavri dari Provinsi Sumatera Barat:
Penjualan embrio: persyaratan untuk pembelian embrio terkait pelaporan TE secara berkala. Ditambah dengan persyaratan menyiapkan petugas yang kompeten (memiliki sertifikat).
- d. Ibu Ramilah Nasution Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor :
Untuk biaya narasumber/juri kontes mengikuti standar APBN/APBD?
- e. Nur Fadilah dari IPB.:
Berdasarkan harga yang dibayarkan untuk kunjungan wisata peternakan, fasilitas apa saja yang diperoleh?
- f. Bapak Ade Hapari dari Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau:
Persyaratan pelayanan untuk pembelian embrio: ada masyarakat yang langsung membeli embrio ke BET secara langsung. Mohon ada konfirmasi kepada Dinas terkait pembelian oleh peternak tersebut. Bagaimana kualitas embrio yang *non-registered*?

2. Analisis

Dari tanggapan yang disampaikan stake holder ke BET Cipelang maka Subkoordinator Informasi dan Penyebarluasan Hasil beserta Kepala Balai menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta FKP diantaranya:

- a. Pembagian kuota embrio yang sudah diserahkan ke dinas sudah menjadi wilayah kerja dinas terkait. Justifikasi untuk pelaksanaan TE didasarkan atas penilaian dari petugas teknis di lapangan.
- b. Peternak yang mendapat rekomendasi dari dinas namun, ada juga peternak yang menginginkan untuk TE dan hal tersebut disampaikan kepada dinas. Peternak mandiri

adalah peternak yang sudah dapat mandiri untuk pembelian embrio sendiri, pemeliharaan ternak secara masif (skala besar). Redaksional persyaratan transfer embrio pada SPP adalah 1) Peternak yang direkomendasikan/mendapat persetujuan teknis dari Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan 2) peternak mandiri/Non rekomendasi Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten.

- c. Persyaratan sesuai yang dipersyaratkan sedangkan biaya untuk pelaksanaan diluar tanggung jawab BET. Persyaratan ditambah dengan menyiapkan petugas yang sudah bersertifikat.
- d. Penambahan persyaratan pada pelayanan produksi embrio dan transfer embrio : Stakeholder wajib melaporkan pelaksanaan produksi embrio secara berkala melalui dinas, baik peternak di bawah rekomendasi maupun peternak mandiri dan BET melakukan monitoring pelaksanaan produksi embrio secara berkala. Persyaratan ditambah dengan menyiapkan petugas yang sudah bersertifikat.
- e. Fasilitas yang didapatkan untuk kunjungan wisata peternakan adalah transportasi dari jembatan menuju BET
- f. Konfirmasi ke BET bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh salah satu pegawai dinas setempat yang digunakan untuk pribadi. Dapat dilakukan koordinasi dengan internal dinas masing-masing. Embrio yang dihasilkan oleh BET merupakan embrio yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit (LSPro) Ditjen PKH. Embrio yang didistribusikan ke daerah saat ini adalah embrio *registered* yang dijamin lengkap catatan silsilah tetua yang digunakan untuk menghasilkan embrio. Embrio yang *non registered* biasanya adalah embrio yang dihasilkan secara IVF (biasanya silsilah dari induk tidak dapat terlacak dengan baik karena sel telur berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH), hanya salah satu tetua yang catatan rekording tetuanya lengkap). BET tidak dapat menjamin mutu genetik dan silsilah dari embrio *non registered*.

3. Rencana Aksi

Pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tematik dan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, beberapa hal yang kami lakukan antara lain:

- a. Mematangkan konsep pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang akan datang secara keseluruhan.
- b. Melakukan optimalisasi pengenalan website dan media social sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
- c. Melaporkan hasil Forum Konsultasi Publik kepada Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pertanian sebagai bahan masukan dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik.
- d. Melakukan Forum Konsultasi Publik setiap tahun sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik tahun sebelumnya.

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Embrio Ternak (BET) tahun 2022 didapatkan hasil sebagai berikut:

- Masukan yang diperoleh stake holder diantaranya adalah terkait persyaratan penjualan embrio, bahwa peternak yang memperoleh embrio hibah merupakan peternak yang memperoleh rekomendasi / persetujuan teknis dari dinas yang membida fungsi peternakan. Sedangkan untuk peternak mandiri, tanpa persetujuan dinas dapat melakukan pembelian embrio langsung dari BET Cipelang dengan persyaratan wajib melaporkan kegiatan transfer embrio secara berkala ke dinas.
- Masukan yang diperoleh sebagai bahan rancangan awal FKP masih banyak yang berbentuk keluhan teknis terkait pelaksanaan kegiatan di satker masing-masing sehingga masih sulit untuk diakomodir sebagai bahan awal rancangan Standar Pelayanan Publik.
- Pemanfaatan website dan media social sebagai sarana untuk menyampaikan saran dan masukan dari stake holder.

2. Saran

Dari pelaksanaan FKP disampaikan saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan FKP mendatang sebagai berikut:

- Penegasan terhadap tujuan pelaksanaan FKP, bahwa FKP bertujuan untuk menjaring saran dan masukan dari peserta.
- Pengecekan fasilitas sarana prasana terutama sound sistem untuk peserta yang mengikuti FKP secara online, sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Undangan Forum Konsultasi Publik

	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG HTM: 102.HMCH.400.000.000.14884 TELEPON: (021) 8211988, 8211989 FAX: (021) 8211988 website: http://www.balaiembrio.peternakan.go.id - email: bet.cipelang@peternakan.go.id	
Nomor	8-0005/TJ/020/F.I/01/2022	24 Januari 2022
Sifat	Biasa	
Lampiran	2 (satu lembar)	
Hal	Undangan Forum Komunikasi Publik Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Terbak Cipelang 2022	

Yang terhormat,
Terlampir
di Tempat

Dalam rangka evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Embrio Terbak (BET) Cipelang Tahun 2022, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pelayanan dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Surat Edaran KemenPANRB No 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, diadang perlu mensosialisasikan Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dan Pemangku Kepentingan. Untuk maksud tersebut dimohon kehadiran Saudara/Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Har/Tanggal : Kamis / 27 Januari 2022
Waktu : 13.00 WIB sd selesai
Tempat : Paagaran Suite Hotel
Alamat : Jl. Bogor Inner Ring Road Lot XIX C-2 No. 17 Bogor Nirwana Residence Bogor Telp. +622517566000, +622517563822
Agenda : Forum Komunikasi Publik Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Terbak Cipelang Tahun 2022

Untuk protokol kesehatan, diwajibkan membawa surat keterangan PCR covid-19 atau Rapid test antigen (swab antigen) COVID-19 dengan hasil negatif yang masih berlaku atau menunjukkan sertifikat vaksin lengkap pada aplikasi peduli lindungi. Selama pertemuan berlangsung para peserta menganggap biaya transportasi (tiket pesawat, kereta, bus tidak termasuk transpor lokal), akomodasi dan konsumsi. Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi nomer WA BET Cipelang : 08111148878.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Dewan Pengendalian
08111148878

TIDAK MENERIMA SUAP, PUNJU DAN GRATIFIKASI DALAM PELAKUKAN TUGAS
SEJUJUR KETENTUAN YANG BERLAKU

Lampiran 1

Yang terhormat :

No	Nama Instansi	Jumlah
1	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang	1
2	Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	1
3	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	1
4	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	1
5	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	1
6	Pimpinan Lembu Benggolo Farm	1
7	Pimpinan Sumiland Farm	1
8	Pimpinan Alda Alya Farm	1
9	Sp. Oktan Tanjung	1
10	Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi	1
11	Kepala UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	1
12	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan	1
13	Mahasiswa magang vokasi	4
Total		16

Lampiran 2 Berita Acara Forum Konsultasi Publik



BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BALAI EMBRIO TERNAK

Pada hari ini, Kamis, 27 Januari 2022, bertempat di Papajaran Suite Hotel Bogor, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Penjualan Embrio, Penjualan Ternak Bibit, Pelayanan Produksi Embrio dan Transfer Embrio, Pelayanan Juri Kontes Ternak, Pelayanan Jasa Juri Kontes, Pelayanan Jasa Narasumber/Instruktur, Pelayanan Penelitian dan Pengembangan, Pelayanan Magang/Bimtek, Pelayanan Kunjungan Wisata Peternakan, dan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Publik oleh Balai Embrio Ternak (BET). Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Persyaratan pelayanan Teknis Embrio: - Peternak berdasarkan rekomendasi Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan - Laporan secara berkala	Persyaratan Pelayanan Teknis Embrio : - Peternak yang direkomendasikan / mendapat persetujuan teknis dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan - Laporan secara berkala melalui Dinas, baik peternak di bawah rekomendasi maupun peternak mandiri	7 Hari Kalender
2.	Persyaratan Pelayanan Penjualan Embrio: - Embrio yang dibeli dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peternak mandiri.	Persyaratan Pelayanan Penjualan Embrio: - Menyiapkan petugas Transfer Embrio.	7 Hari Kalender

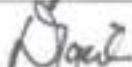
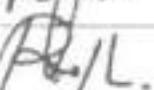
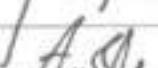
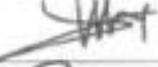
Pimpinan unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stake holder yang hadir melakukan pemantauan dan mengawasi proses tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang disepakati bersama.

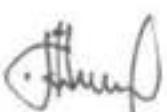
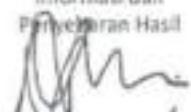
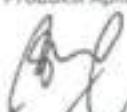
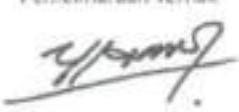
TIDAK MENERIMA SUAP, FUNGSI DAN GRATIFIKASI DALAM PELAKUANAN TUGAS
SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bogor, 27 Desember 2021

NO	NAMA*	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Jakaria	Akademisi	
2.	NASIRUDIN	UPT Kementeran	
3.	DARMAYANTI	Dinas Peternakan Provinsi	
4.	MUCHIN KRAMDI	Dinas Peternakan Kabupaten	
5.	TEGUH WICAKSONG	UPT Daerah	
6.	abdoel abdya	Swasta	
7.	Aep Saputra	Tokoh Masyarakat	
8.	COPIN NUGROHO	Mahasiswa/Pelajar	

*Penandatangan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP.

Ka Subbag Tata Usaha  Deasy Zamzani, S.Pt,M.Si	Subkoordinator Informasi dan Pengelolaan Hasil  Sri Wahyuni S., S.Pt, M.Si	Subkoordinator Produksi Aplikasi  Amy Rosmayanti, S.Pt	Subkoordinator Pemeliharaan Ternak  Yanyan Setiawan, S.Pt,M.Si
 Bpk. Ghozali Padindungan, M.P., NIP. 196411261992031001			

Lampiran 3 Salinan Daftar Hadir



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
KOTAMOBAGU NOMOR 488/BK/PPN/1999
TELEPON (021) 8217888, 8217999 FAXSIMIL (021) 8271555
website : <http://www.balaiembrioternek.pertanian.go.id> - email : bkt.cipelang@pertanian.go.id



Halaman 1

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Januari 2022
Jam : 13.00 sd selesai
Tempat : Pajajaran Suite Hotel, Jl Bogor Inner Ring Road, Bogor
Acara : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BET Cipelang

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dedi Ida Zaini M.Si	EIB Lembaran	
2	CORIN MOURINDO	UNIVERSITAS TADULOA	
3	Riyzaki Putra H.	UNPAD	
4	GALIH GUMILAR	IPB	
5	Akhmad Pujiyati	UNS	
6	L.Dwi Aryanto	PPPKD BPPTKG	
7	H.untung	Abdi Alqo Ding Fa	
8	Ika Tri Evicati	BPMSP Berastagi	
9	Joko Susanto	Lembar beranggotakan	
10	Sitiqah N.	MAPBIOT	
11	Fiza Jumah N	DR. Puspita	
12	Prakesa Lestari	DR. Parwita	
13	Muzirukin	BPMSPH	
14	Ayu Gunawati	Makutopura	
15	Oktan Tanjung	Swasta	

TIDAK MENERIMA SHAP, FUNGSI DAN GRATIFIKASI DALAM PELAKUANAN TUGAS
SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Hari : Kamis
 Tanggal : 27 Januari 2022
 Jam : 13.00 sd selesai
 Tempat : Pajajaran Suite Hotel, Jl Bogor Inner Ring Road, Bogor
 Acara : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BET Cipelang

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
16	Sukma Riadi	BIBD PROV NTB	16.
17	Ridwan Sft	Dinas Kesehatan Kabupaten	17.
18	Muhammad Nur Mursy NTB		18.
19	Rosyanti, S.Pd	DISNAKESDUSN PARIMA	19.
20	Hari Mulyono, S.Pd	Dinas Pendidikan Perguruan	20.
21	Kantowidoro	Staf BKK Teknologi dan	21.
22	M. Rostikere P	DAKH Kotab	22.
23	drh. Lili Sri Lestari	Dinas Pertanian Dki Jakarta	23.
24	Rahmati Astriana	Dinas Pertanian Rob Diharja Tangerang	24.
25	Utami Sulawati, A.Nd	UPD 13 Dinas Pem. Jatin	25.
26	Salidjo		26.
27	TEGUM WICARSONO	DISNAK Pro. Tatim	27.
28	MEUFUSTIAH HELMI	Dinas Perikanan dan Peleburan Kta Bandung	28.
29	M. AGUS BENAYAN	Dinas Kependidikan dan Pengembangan Sosial	29.
30	ARYANTO	Dinas Perikanan dan Peleburan Kta Probolinggo	30.
31	Rajar Tri Hanthes	Dinas Perikanan & Pertanian Kota Bogor	31.
32	Pancasati Wahyul	Dinas Perikanan & Pertanian Kota Lampung	32.
33	Nafiz Suliswijo	Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan	33.
34	Fesa Yuni N	Dinas Pertanian dan Kesatuan Day	34.
35	Ichwan Dentolo	Dinas Pertanian dan Pangan Kp. DIY	35.

Hari : Kamis
 Tanggal : 27 Januari 2022
 Jam : 13.00 sd selesai
 Tempat : Pajajaran Suite Hotel, Jl Bogor Inner Ring Road, Bogor
 Acara : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BET Cipelang

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
36.	Erdang Firdaus	Dinas pertanahan dan pabungan	36.
37.	SABILA GRAND TIRAMUJI	DINAS PERTANAKAN KAB. JAKARTA BARAT	37.
38.	JUSMEN HM	Dinas pertanahan dan perkebunan kab. kota puncak jaya	38.
39.	Dalimun S.Pd	Dinas pertanahan dan perkebunan kab. kota puncak jaya	39.
40.	M. IFFAN ARI SHOPY	DISTAN-KAN kab Tangerang Hulu	40.
41.	Ale Hapori S.Pd	Dinas pertanahan dan perkebunan kab. kota Tangerang Hulu	41.
42.	UMMI QORIAH	DPKH prov. Riau	42.
43.	Nurta Hartini	Dinas pertanahan kab. pulau riau	43.
44.	Davi Kusmara	Badan keswan kab. Lhokseumawe	44.
45.	EFFDAL KAVRY	DPKH Sumbar	45.
46.	HARWINI	Dinas pertanahan kab. Tegal Dalam	46.
47.	ARI BUDIAGO S.Pd	Dinas pertanahan dan perkebunan kab. Lembar (Central)	47.
48.	Abdulqodir S.Pd	Dinas pertanahan dan perkebunan kab. kota Puncak Jaya	48.
49.	Freelce J. Manday	Dinas pertanahan dan perkebunan kab. kota Puncak Jaya	49.
50.	Zaini Simanjuntak	Dinas pertanahan kota minahasa utara	50.
51.	Scrip Surono	Dinas pertanahan kota. Wonogiri	51.
52.	Rizzaik Putra H.	UNPAD.	52.
53.	GALIH GUMILAR	IPB	53.
54.	COCIN MULINDO	UNTAD	54.
55.	Sri Wahyuni S.	BET	55.

Hari : Kamis
 Tanggal : 27 Januari 2022
 Jam : 13.00 sd selesai
 Tempat : Pajajaran Suite Hotel, Jl Bogor Inner Ring Road, Bogor
 Acara : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BET Cipelang

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
56.	Menik S	BET	56. ✓
57.	Fahruddin Darlam	BET	57. ✓
58.	Wani Kurniati	BET	58. ✓
59.	Elinawati Rismati S.	BET	59. ✓
60.	Yanyan Satiawan	BET Cipe Leng	60. ✓
61.	Dewi F		61. ✓
62.	M. Kizzillah		62. ✓
63.			63.
64.			64.
65.			65.
66.			66.
67.			67.
68.			68.
69.			69.
70.			70.
71.			71.
72.			72.
73.			73.
74.			74.
75.			75.

Lampiran 4 Notulensi Forum Konsultasi Publik

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : 02/Pn/Kom/05/2022
		Tanggal : 01 Mei 2022
	NOTULEN RAPAT	Ruang : II Hakim : I dan II

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor BET Cipelang
 Hari/Tanggal : Kamis/27 Januari 2022
 Waktu : 13.30-20.00
 Agenda : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Ternak Cipelang
 Peserta : 53 orang

Hasil :

1. Pembukaan
2. Sambutan dan paparan oleh Ka Balai :
 - Dengan FKP diharapkan ada peraturan yg dapat diubah untuk memudahkan pengguna layanan, namun ada beberapa yg tidak bisa diubah seperti PP Tarif
 - Kami cukup bangga dengan napa yang kami miliki, krm SISCOBETI merupakan yg terbaik di PKH, namun jangan seperti katak dalam tempurung, sehingga kami harapkan masukan dari bp/ibu
 - Apa yang kami punya untuk kebaikan bp/ibu, jawab kuisioner dengan napa adanya yg bp/ibu rasakan
 - Pelayanan adalah yg paling sering mendapat complain adalah sinyal , jalan, air keruh. Kritis apapun harus diperbaiki.

Paparan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PAN dan RB, Jeffrey Erwan Muller

3. Paparan Standar Pelayanan Publik sesuai Permenpanrb nomor 15 tahun 2014
 - Jawa dari pelayanan publik ada di Standar
 - Mengapa perlu standar? a) sesuai amanat UU pelayanan publik bahwa setiap penyelenggaran pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan; b) aspirasi dari masyarakat yang perlu pelayanan publik yang berkualitas; c) jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan
 - Standar pelayanan diartikan sebagai tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
 - Pasal 20 amanat UU 25 tahun 2009 bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan, dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengkonsertakan masyarakat dan pihak terkait
 - Siklus penyusunan standar pelayanan (sp): penyusunan rancangan sp → pembaHASANAN sp → penetapan sp → penerapan sp → penetapan dan penerapan maklumat pelayanan → monitoring dan evaluasi → perbaikan berkelanjutan
 - Keterlibatan masyarakat: pembahasan rancangan sp dengan masyarakat
 - Masyarakat dan pihak terkait sesuai PP nomor 96 tahun 2012 pasal 23
 - Proses pelibatan masyarakat: rancangan sp → berita acara →

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : 04/10.225/01-L/01/2016 Tanggal : 03 Januari 2016 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 8
	NOTULEN	

- Prinsip penyusunan standar pelayanan: sederhana, partisipatif, akunabel, berkelanjutan, transparansi, keadilan
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan: tugas dan fungsi yang dimiliki, apa jenis pelayanan dan produk akhirnya, siapa masyarakat yang dilayani (umum, instansi pemerintah, atau internal), dokumen pendukung (SOP, SPM, dll), melakukan monov berkelanjutan terhadap sp yang telah disusun
- Manfaat sp, sop, dan spm: sop → kepastian pelaksanaan, sp → kepastian penerapan (customer), spm →
- Komponen sp, manufacturing (komponen standar pelayanan)
- Service delivery: persyaratan (buat persyaratan yang mudah baik persyaratan teknis atau administrasi); sistem, mekanisme dan prosedur (melibatkan instansi mana saja, manual atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tata cara pelayanan yang dilakukan penerima pelayanan); jangka waktu pelayanan; biaya/tarif (bayar atau tidak); produk pelayanan (jelas, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan keterluar yang telah ditetapkan); aduan, saran, masukan (tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)
- Manufacturing jumlah pelaksana harus menyesuaikan dengan jenis dan jumlah layanan yang disediakan
- Sarpras/fasilitas: komplit, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan
- Kompetensi pelaksana memiliki kemampuan (keahlian, pengetahuan)
- Pengawasan internal: pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan
- Jaminan pelayanan: sudah sesuai dengan standar
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman
- Evaluasi kinerja pelayanan: penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sp
- Penetapan dan penerapan **Maklumat Pelayanan**: mempublikasikan secara luas, jelas, dari terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat

Tanya Jawab

4. Tanggapan oleh ibu Ida dari BIB Lembang
 - Sudah ditetapkan proses pelayanan dan sudah diberikan penjelasan kepada customer, bagaimana cara menjelaskan kepada customer bahwa produk yang ditawarkan membutuhkan waktu?
 - Respon disampaikan sp yang telah ditetapkan kepada customer, kemudian dilakukan diskusi dengan customer tersebut dengan tujuan menyelaraskan kemampuan

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : BET/PL/FKPP/05/2022
		Tanggal : 01 Mei 2022
	NOTULEN RAPAT	Revisi : 0 Halaman : 3 dari 8

penyelenggara. Melakukan identifikasi bagian mana yang perlu untuk dioptimalkan misal jumlah petugas pelayanan.

5. Tanggapan oleh Bapak Amir dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi Moutong:
 - Pelayanan diberikan secara mobile (tidak hanya di satu tempat saja) sehingga petugas pelayanan tidak mengenal waktu dan tempat harus memberikan pelayanan, bagaimana gambaran pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan tersebut? Terkait maklumat pelayanan, adakah decree yang dapat mengikat antara petugas pelayanan dan masyarakat?
 - Respon: dalam menyusun rancangan sp harus mencermati pelayanan temuk yang tersebar di masyarakat: menyalurkan kemampuan penyelenggara dengan ketutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
6. Tanggapan oleh Bapak Dion dari Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara:
 - Bagaimana cara petugas pelayanan menuntut biaya operasionalnya dikarenakan wilayah operasional pelayanan yang cukup jauh?
 - Respon: BET memberi masukan ke pihak pemerintah, masukan disampaikan oleh pak Dion kepada kadir PPU/ direktur agar dibuat kebijakan terkait operasional dilapangan
7. Tanggapan oleh Ibu Leri dari Dinas Kabupaten Sukoharjo:
 - Aktualisasi untuk penerapan sp cukup sulit, bagaimana cara menerapkan sp secara konsisten?
 - Respon: apabila sudah ditetapkan standar, dapat menerapkan SPBE dan melibatkan masyarakat untuk identifikasi apakah masyarakat lebih bersang menggunakan aplikasi atau secara manual. Perlu dilakukan perubahan pola pikir.
8. Tanggapan oleh Bapak Lukman dari DKPP Prov Jawa Barat (BPPIBTSP BuniAisyih)
 - Sarana prasarana yang dinilai kurang bagus oleh masyarakat, bagaimana merespon keluhan yang dianggap belum memuaskan tersebut? Cara yang dapat dilakukan untuk mendapat dukungan anggaran untuk perbaikan fasilitas pelayanan publik?
 - Respon: dilakukan monev berkelanjutan terhadap sp yang telah disusun. Perbaikan komponen standar pelayanan: manufacturing dan service delivery. Hasil pemantauan dan rekomendasi evaluasi seperti perbaikan sarana dan prasarana digunakan untuk perbaikan pelayanan.
9. Statement terakhir:
 - Harus berkomunikasi dengan masyarakat dan memahami kebutuhan masyarakat untuk menetukan standar pelayanan

Paparan oleh Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt., M.Si.

10. Standar Pelayanan Publik BET Cipelang tahun 2022.

- Jenis layanan yang ada di BET: penjualan embrio, penjualan ternak bibit, pelayanan produksi embrio dan transfer embrio, BMTEC/magang, kunjungan wisata peternakan, jasa narasumber, juri kontes, penelitian, pemberian data dan informasi
- Service delivery: produk layanan, persyaratan, prosedur, waktu layanan, biayatarif, dan pengelolaan pengaduan

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : 38/PTU.225/F2/03/2018
		Tanggal : 03 Januari 2018
	NOTULEN	Revisi : 0 Halaman : 4 dari 6

- Motto layanan "Kualitas adalah Prioritas"
- Janji layanan "BET on SPIRiT"
- Persyaratan pelayanan di BET: semua pelayanan membutuhkan identitas diri (KTP/SIM) dari penerima layanan, pembayaran secara non tunai,
- Prosedur pelayanan: pengajuan pelayanan dapat melalui surat, email, WhatsApp atau SISCOBETI
- Waktu pelayanan: waktu penyelesaian berbeda-beda sesuai dengan jenis layanan
- Biaya pelayanan: biaya pelayanan berbeda-beda sesuai dengan jenis layanan
- Produk pelayanan: biaya pelayanan berbeda-beda sesuai dengan jenis layanan
- Pengelolaan pengaduan: melalui kotak pengaduan, petugas, SMS/Wa, Telepon, Siscobeti, Email.
- Manufacturing: maklumat pelayanan "dengan ini, kami (BET Cipeplang) menyatakan sanggup menyediakan
- Sarana prasarana yang mendukung pelayanan
- Kompetensi pelaksana disesuaikan dengan jenis layanan yang dikehendaki
- Pengawasan internal secara berjenjang
- Jumlah pelaksana menyesuaikan dengan jenis layanan yang dikehendaki
- Jaminan pelayanan sesuai dengan jenis layanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- SKHTE yang dikeluaran oleh BET ditanda tangan secara elektronik dan untuk melakukan pengecekan keaslian dokumen tersebut dapat melakukan scan QR code menggunakan aplikasi veryDS yang dikeluaran oleh BSRE

11. Tanggapan oleh Bapak Amir dan Kabupaten Parigi Moutong:

- Bagaimana pembagian kuota embryo yang didistribusikan oleh BET? Dan bagaimana justifikasi pelaksanaan TE kepada peternak?
- Respon: pembagian kuota embryo yang sudah diserahkan ke Dinas sudah menjadi wilayah kerja Dinas terkait. Justifikasi untuk pelaksanaan TE didasarkan atas penilaian dari petugas teknis di lapangan.

12. Tanggapan oleh Bapak Lukman dari BPPBTSP Bunikasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat:

- Peternak yang direkomendasikan oleh Dinas atau peternak yang minta rekomendasi? Mohon penjelasan untuk yang peternak mandiri tanpa rekomendasi dari Dinas.
- Respon: Peternak yang mendapat rekomendasi dari Dinas namun, ada juga peternak yang menginginkan untuk TE dan hal tersebut disampaikan kepada Dinas. Peternak mandiri adalah peternak yang sudah dapat mandiri untuk pembelian embryo sendiri, pemeliharaan ternak secara masif (skala besar)

13. Tanggapan oleh Ibu Ramlah dan Dinas Peternakan Kabupaten Bogor

- Untuk laporan TE secara berkala sebaiknya melalui Dinas tidak dilakukan secara mandiri oleh peternak

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : 02/TU/Yarm/03/2023
	Tanggal : 03 Mei 2023	
	NOTULEN RAPAT	Rensi : 0 Halaman : 5 dari 5

14. Tanggapan oleh Bapak Efdal Kavri dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat:
- Penjualan embrio: persyaratan untuk pembelian embrio terkait pelaporan TE secara berkala. Ditambah dengan persyaratan menyiapkan petugas yang kompeten (memiliki sertifikat).
 - Respon: persyaratan sesuai yang dipersyaratkan sedangkan biaya untuk pelaksanaan diluar tanggung jawab BET. Persyaratan ditambah dengan menyiapkan petugas yang sudah bersertifikat.
15. Tanggapan oleh ibu ... dari ... :
- Untuk biaya narasumber/juri kontes mengikuti standar APBN/APBD?
 - Respon: mengikuti standar dan daerah
16. Tanggapan oleh Nur Fadilah dari IPB:
- Berdasarkan harga yang dibayarkan untuk kunjungan wisata peternakan, fasilitas apa saja yang diperoleh?
 - Respon: transportasi dari jembatan menuju BET
17. Tanggapan oleh Bapak ... dari Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau:
- Persyaratan pelayanan untuk pembelian embrio: ada masyarakat yang langsung membeli embrio ke BET secara langsung. Mohon ada konfirmasi kepada Dinas terkait pembelian oleh peternak tersebut.
 - Bagaimana kualitas embrio yang non-registered?
 - Respon: konfirmasi ke BET bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh orang Dinas yang digunakan untuk pribadi. Dapat dilakukan koordinasi dengan internal Dinas masing-masing.
 - Embrio yang dihasilkan oleh BET merupakan embrio yang sudah tersertifikasi. Embrio yang non registered adalah embrio IVF. BET tidak dapat menjamin kualitas dari embrio non registered
18. Sambutan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, drh. Agung Suganda, M. Si.:
- BET Cipelang melakukan kegiatan evaluasi agar kegiatan-kegiatan BANPEM termasuk kegiatan TA yang berlanjut di tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar
 - Diharapkan kegiatan BANPEM di tahun 2022 dapat selesai sebelum bulan Desember 2022
 - Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan yang dapat membantu untuk percepatan penyelesaian kegiatan BANPEM tersebut dan perbaikan di tahun ini
 - Tidak ada yang tidak bisa sepanjang tim Satker kompak, melakukan komunikasi dengan baik dan tepat memilih penyedia yang melaksanakan pengadaan barang tersebut
 - Kegagalan di tahun anggaran 2021 sebaiknya tidak terjadi kembali di tahun anggaran 2022
 - Hasil evaluasi kegiatan di TA 2021: juknis dapat segera ditetapkan, CPCL dilakukan oleh Dinas dan Satker hanya melakukan verifikasi untuk kelompok penerima manfaat yang diusulkan oleh Dinas dan diharapkan tanggal 31 Januari Satker sudah menerima nama dari masing-masing kelompok penerima manfaat

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : 99/TH/125/T2/21/2018
		Tanggal : 01 Januari 2018
	NOTULEN	Revisi : 0 Halaman : 8 dari 8

- Diharapkan untuk tender sapi pengganti di TA 2021 oleh BET pada hari Jumat ini sudah tayang
- Pengembangan BB: diharapkan dapat menyediakan Belgian Blue 100.000 ekor pada tahun 2024. Yang dibutuhkan punya pejantan, embrio
- BET Cipelang di tahun 2022 mencari akseptor lokal yang berpotensi untuk pengembangan BB
- Kegiatan pelayanan publik di BET sudah terbukti dapat berjalan dengan baik.
- Terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten untuk kegiatan BANPEM
- Untuk Dinas Provinsi dan Kabupaten diharapkan dapat memberi perhatian kepada ternak yang didistribusikan melalui kegiatan BANPEM karena ternak-ternak yang diberikan ke kelompok tersebut menjadi tanggungjawab kelompok dan Dinas. Tidak terjadi penyalahgunaan ternak
- SIKOMANDAN: penyediaan sernen BB dapat tercukupi (apabila dibutuhkan dapat dilakukan impor) sesuai dengan target untuk mencapai 100.000 ekor
- Salah satu inovasi untuk WBMM adalah salah satu inovasi pelayanan publiknya direplikasi oleh Satker lain

Penutupan

19 Penandatangan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik oleh perwakilan stake holder BET Cipelang:

- Akademisi diwakili oleh bapak Jiskaria (Dosen Fapet IPB)
- UPT Kementerian diwakili oleh Nasirudin (BPMSPH Bogor)
- Dinas Peternakan Provinsi diwakili oleh Ibu Darmayanti (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Sumbar)
- Dinas Peternakan Kabupaten diwakili oleh Bp Muhsin Khamidi (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung)
- UPT Daerah oleh BAPAK diwakili Teguh Widaksono dari UPTIB Jawa Timur
- Swasta diwakili oleh Bapak Oktan Tanjung
- Tokoh Masyarakat diwakili oleh Aep Saepulloh
- Mahasiswa/Pelajar diwakili oleh Courin Mourindo



Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt., M.Si.
NIP 197906062006042002

Cipelang, 27 Januari 2022

Notulis

Menik Setyarini, A.Md
NIP 197706012011012003

Lampiran 5 Dokumentasi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik





